

**PEMIMPIN NON MUSLIM PADA WILAYAH MAYORITAS
MUSLIM MENURUT K.H. SAID AQIL SIRADJ DAN BUYA
YAHYA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KRITIS JURGEN
HABERMAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi

Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Daniel Alexandi (E71218035)

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daniel Alexandi

NIM : E71218035

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Alamat : Jl. Melati I No. 6 Waru, Sidoarjo

No. Telp : 085101644716

Judul Skripsi : Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut
K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika
Kritis Jurgen Habermas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri, kecuali bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.
2. Apabila skripsi yang sudah diujikan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan revisinya.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 28 Desember 2022

Yang menyatakan



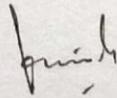
Daniel Alexandi
NIM : E71218035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "*Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas*". yang ditulis oleh Daniel Alexandi ini memperoleh persetujuan pada tanggal 28 Desember 2022

Surabaya, 28 Desember 2022

Telah disetujui oleh



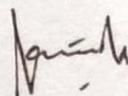
(Dr. Muktafi, M.Ag.)
NIP. 19600813199403100

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Daniel Alexandi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satu.

Tim Penguji

1. Dr. H. Muktafi, M. Ag
NIP. 19600813199403100



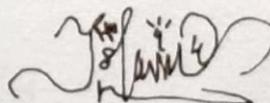
2. Dr. H. Kasno, M. Ag
NIP. 195912011986031006



3. Fikri Mahzumi, M. Fil. I
NIP. 198204152015031001



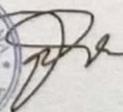
4. Wildah Nurul Islami, M. Th. I
NIP. 198509232020122008



Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Negeri Sunan Ampel



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Daniel Alexandi
NIM : E71218035
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : alexd171299@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H. Said Aqil

Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Januari 2023

(Daniel Alexandi)

Judul Skripsi : Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut
K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika
Kritis Jurgen Habermas

NAMA : Daniel Alexandi

NIM : E71218035

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

ABSTRAK

Permasalahan pemimpin non muslim memunculkan perdebatan yang arahnya pada hubungan antara agama dan negara. Pada perkembangan pemikiran dari pemimpin non muslim yang berkependudukan mayoritas muslim menjadi wacana penuh kontroversi. Permasalahan ini semakin keruh saat hendak diadakan pemilihan kepala negara maupun daerah, yang mana masyarakat kerap kali resah karena perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya umat muslim mendukung calon pemimpin non muslim.

Terdapat dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pandangan K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya mengenai pemimpin non muslim? Kedua, bagaimana pandangan K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya mengenai pemimpin non muslim dari perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian mengkaji dua sudut pandang yang berbeda antara K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya yang saling bertentangan. Jenis penelitian ini adalah *library research* yang kemudian dianalisis menggunakan metode hermeneutika kritis.

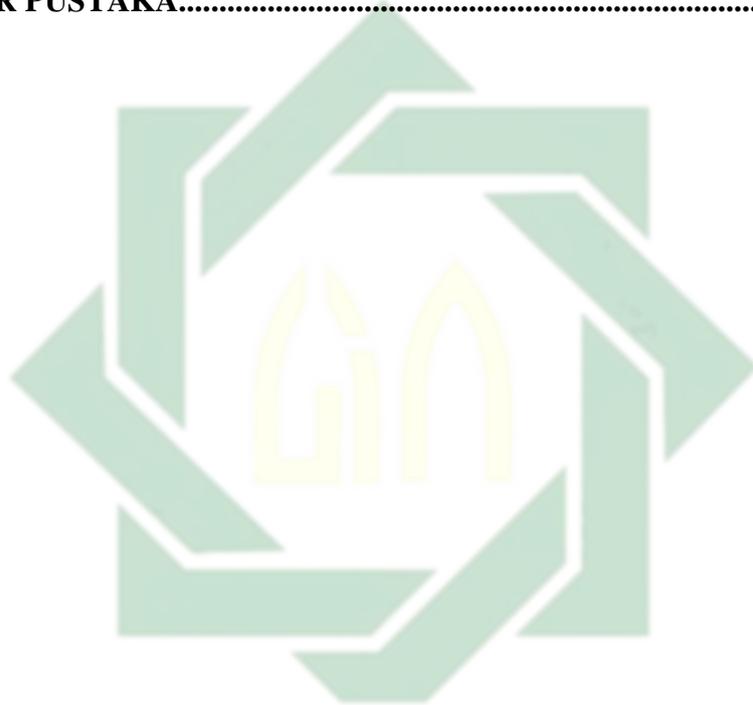
Maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan, K.H. Said Aqil Siradj memperbolehkan pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim, karena setiap warga negara mempunyai hak dan derajat yang sama untuk menjadi pemimpin. Sedangkan, Buya Yahya melarang memilih dan menjadikan non muslim sebagai pemimpin karena tidak sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Qur'an.

Kata Kunci: Pemimpin, Non Muslim, Said Aqil, Buya Yahya

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metode Penelitian.....	14
F. Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: LANDASAN TEORI.....	17
A. Kepemimpinan.....	17
B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam.....	23
C. Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas.....	30
BAB III: BIOGRAFI SERTA PEMIKIRAN NON MUSLIM DARI K.H. SAID AQIL SIRADJ DAN BUYA YAHYA.....	36
A. Biografi K.H. Said Aqil Siradj.....	36
B. Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj Tentang Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim.....	42
C. Biografi Buya Yahya.....	44
D. Pemikiran Buya Yahya Tentang Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim.....	47
BAB IV: PEMIMPIN NON MUSLIM PADA WILAYAH MAYORITAS MUSLIM MENURUT K.H. SAID AQIL SIRADJ DAN BUYA YAHYA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KRITIS JURGEN HABEERMAS.....	50
A. Konsep Kepemimpinan Non Muslim dalam Islam.....	50

B. Analisis Pemimpin Non Muslim Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas.....	54
BAB V: PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh hal yang kita lakukan di dunia dan akhirat sudah pasti ada yang mengatur dengan baik supaya tujuan-tujuan yang ingin kita capai bisa terwujud. Urusan kecil hingga yang besar pasti ada aturannya, termasuk dalam memilih pemimpin, mulai dari sosok, kriteria, dan pola kepemimpinannya. Tujuan dari karya ilmiah ini ditulis ialah membahas mengenai pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim. Dengan demikian, diharapkan karya ilmiah ini bisa dijadikan sebagai salah satu dari banyak petunjuk dalam memilih pemimpin yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pemimpin dan kepemimpinan ialah dua hal yang identik tapi tidak sama. Menurut Ara Hidayat dan Imam Machali, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk bisa menggerakkan, bisa memberi semangat, dapat mempengaruhi serta memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan dianggap sebagai kemampuan, sedangkan pemimpin bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan tersebut.¹

Seorang pemimpin bukan sekedar mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat, melainkan juga memikul

¹ Ahmad Khoiron Minan & Nizar Afifi, "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist", *At-Turas*, Vol. 7, No. 1 (2020), 31.

tanggung jawab yang berat. Pemimpin ialah khalifah di dunia yang perannya mengarahkan dan memimpin manusia untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara serta menaati hukum dari Tuhan.²

Mengutip dari buku Manajemen Syariah, Ahmad Ibrahim mengatakan bahwa sebagai pemimpin harus punya sifat yang mulia pada jiwanya, hal ini bertujuan agar bisa dijadikan sebagai panutan untuk para pengikutnya. Salah satu sifat itu ialah akidah, seorang pemimpin memiliki kewajiban memimpin para pengikutnya sesuai dengan ketentuan, aturan, serta batasan yang telah ditetapkan Tuhan. Pola kepemimpinan merupakan upaya seseorang memberikan pengaruh pada orang lain atau pengikutnya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.³

Islam memiliki konsep mengenai kepemimpinan, hal ini tergambar pada kepemimpinan dari Rasulullah , lalu turun pada *Khulafā al-Rasyidin* dan berlanjut pada sahabat-sahabat selanjutnya yang sumber utamanya dari al-Qur'an dan hadis. Membahas kepemimpinan tentu saja tidak terlepas dari yang dipimpin, entah itu pada lingkungan kecil hingga lingkungan yang besar. Karena beberapa negara bersifat plural, sehingga muncul kegaduhan diakibatkan oleh kepantasan non muslim dijadikan pemimpin pada daerah yang punya penduduk mayoritas muslim.⁴

² Husnaeni, "Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Al-Dustur*, Vol.2, No.2 (2019), 164.

³ Muhammad Charis, dkk, "Kategori Kepemimpinan dalam Islam", *Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No.2 (2020), 180-181.

⁴ Husnaeni, "Kajian Hukum Islam", 32.

Permasalahan mengenai pemimpin non muslim memunculkan perdebatan pada hubungan antara agama dan negara. Pada era globalisasi, seseorang diangkat sebagai pemimpin karena banyak dipengaruhi oleh segala permasalahan yang ada pada dunia politik. Terlebih lagi dengan adanya sistem demokrasi, seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan sosok dengan perolehan suara terbanyak dari masyarakat. Pada dunia politik, banyak individu beragama non muslim bukan hanya individu yang muslim.⁵

Pada perkembangan pemikiran dari kepemimpinan oleh non muslim yang berkependudukan mayoritas muslim menjadi wacana penuh kontroversi, entah itu dari konsep maupun penerapannya lebih-lebih pada negara berpenduduk mayoritas muslim. Mengenai permasalahan pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim terdapat perbedaan sudut pandang. Yang pertama, memperbolehkan non muslim menjadi pemimpin, dan kedua, menolak pemimpin dari non muslim. Salah satu tokoh besar NU yakni K.H. Said Aqil Siradj pendapatnya selaras dengan Gus Dur, bahwa non muslim memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara. Masing-masing warga negara punya hak dan derajat setara di depan hukum. Oleh sebab itu, setiap warga negara baik yang muslim maupun non muslim berhak untuk memilih dan dipilih menjadi kepala negara. Pendapat K.H. Said Aqil Siradj berdasar pada teori imamah yang menurutnya bukan bagian dari *ushul al-din*. Konsep serta penerapan imamah yang ada pada kitab fikih masih terbuka dan harus diselaraskan dengan keadaan masyarakat modern kini. Beliau mengulang

⁵ Ibid., 162.

argumen dari Ibn Taimiyah bahwa lebih baik dipimpin oleh non muslim tapi adil daripada pemimpin muslim yang zalim.⁶

Sedangkan, Buya Yahya menolak memilih pemimpin yang tidak beriman pada Allah. Menurut Buya Yahya, surat Al-Mumtahanah ayat 1 dan 2 bisa dikaitkan dengan permasalahan kepemimpinan dan mengharamkan memilih pemimpin yang tidak beriman serta memilih pemimpin dari musuh-musuh Allah dari orang-orang beriman.⁷ Jika pilihannya ada orang Islam kita wajib memilih yang muslim. Orang Islam tidak diperbolehkan mengangkat, menjadikan, dan memilih non muslim sebagai pemimpin. Jika dalam sebuah tatanan sudah ada pemimpin non muslim, kita tidak boleh patuh pada hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Beliau tidak setuju pada argumen mengenai “Lebih baik dipimpin oleh non muslim tapi adil daripada muslim yang dzalim”, karena perbandingan yang tidak sebanding dan hanya sekedar khayalan. Perbandingan dikatakan setara ketika pemimpin muslim yang adil dibandingkan dengan non muslim adil, pernyataan ini disuarakan oleh Buya Yahya pada pengajiannya.⁸

Dengan adanya perbedaan sudut pandang akan memunculkan pergeseran paradigma antara ulama dalam menerjemahkan gagasan-gagasan al-Qur’an mengenai kepemimpinan dari non muslim. Faktor utama dari perubahan ini tentu saja berasal dari latar ruang dan juga waktu. Meskipun

⁶ Izzul Madid, “Dinamika Pemikiran Ulama dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia”, *Mizani*, Vol. 5, No. 2 (2018), 21-22.

⁷ Al-Bahjah TV, 2016, 15 Maret, “Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=4esUrcmDnuI>

⁸ Al-Bahjah TV, 2017, 5 April, “Masihkah Anda Akan Memilih Pemimpin Non Muslim: Buya Yahya Menjawab”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ORvGnLIZtJs>

permasalahan ini masih mengalami perdebatan, pemimpin non muslim tetap menjadi isu perdebatan yang tak pernah basi dan selalu hangat. Permasalahan ini tidak bisa ditolak, karena pemimpin ini sangat berkaitan dengan politik kekuasaan yang sering menyebabkan perilaku korup. Oleh sebab itu, pemimpin non muslim akan selalu menjadi permasalahan dan wacana yang hangat dan tidak pernah basi pada pemikiran politik Islam.⁹

Dengan menggunakan teori hermeneutika kritis Jurgen Habermas bertujuan untuk mengungkap tujuan-tujuan terselubung mengenai boleh tidaknya non muslim memimpin wilayah yang masyarakatnya mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siraj dan Buya Yahya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siraj dan Buya Yahya?
2. Bagaimana pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siraj dan Buya Yahya perspektif hermeneutika kritis Jurgen Habermas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang telah tertera, tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Mengetahui pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siraj dan Buya Yahya.

⁹ Dede Rodin, "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Al-Quran", *Mutawatir*, Vol. 7, No. 1 (2017), 29-31.

2. Mengetahui pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya perspektif hermeneutika kritis Jurgen Habermas.

D. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Khoiron Minan & Nizar Afifi	Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist	At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, 2020 (Sinta 3)	Ada banyak pendapat mengenai kepemimpinan non muslim terutama dari ulama-ulama masa klasik kontemporer. Tanggapan para ulama pada masa klasik cenderung menolak kepemimpinan non muslim karena keadaan sosio-historis pada saat itu. Penolakan kepemimpinan non muslim oleh para ulama klasik untuk mempertahankan aqidah Islam. Sedangkan, ulama kontemporer dengan segala permasalahan kekinian membolehkan kepemimpinan non muslim tapi tetap memperhatikan batasan dari ulama serta batasan yang telah ditentukan al-Qur'an dan Hadis. Para ulama

				membolehkan berdasar konteks permasalahan saat ini berbeda dengan permasalahan zaman dulu. Apalagi saat ini ada HAM yang memberi hak pada setiap orang untuk mengajukan diri sebagai pemimpin.
2.	Dede Rodin	Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Al-Quran	Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, Vol. 7, No. 1, 2017 (Sinta 2)	Jurnal ini menjelaskan bahwa memilih non muslim sebagai pemimpin merupakan situasional dan larangan memilih non muslim sebagai pemimpin tidak bersifat mutlak. Larangan itu berlaku apabila memenuhi dua syarat. Pertama, umat muslim ada pada situasi serta kondisi yang memungkinkan mereka memberlakukan larangan tersebut. Kedua, umat muslim tidak boleh memilih non muslim sebagai pemimpin apabila non muslim tersebut memusuhi umat Islam. Apabila salah satu atau keduanya memenuhi, larangan tersebut tidak dapat diterapkan.
3.	M. Agus Muhtadi	Penafsiran Kontekstualitas Perihal	Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran	Pada jurnal ini menjelaskan tekstual-fundamentalis yang

	Bilhaq	Kepemimpinan Non Muslim dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis	Islam (Sinta 3)	<p>berfokus pada boleh atau tidaknya non muslim sebagai pemimpin. Seperti ormas HTI yang dianggap sebagai kelompok tekstual-fundamentalis yang tanpa sengaja melewati kriteria sebagai seseorang pemimpin. Agar bisa menjadi pemimpin, orang itu harus kuat, dapat dipercaya, sehingga bisa menciptakan kemakmuran dan keadilan di masyarakat. Maka dari itu, perlu untuk menafsirkan kontekstualitas pada al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 28 dan surat Al-Maidah ayat 51, dan juga hadis yang berkaitan, lalu dielaborasi dengan nilai-nilai universal yang ingin dicapai oleh Islam. Jika memang membutuhkan pertolongan non muslim serta cara pandang non muslim tersebut baik pada umat Islam, maka hal itu diperbolehkan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad saat</p>
--	--------	---	-----------------	---

				menerima bantuan dari Shofwan bin Umayyah dan Abdullah bin Uraiqit.
4.	Muhammad Galib Iqbal	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemimpin Non Muslim dalam Masyarakat Islam	Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017	Pada skripsi ini menghasilkan 2 kesimpulan. Pertama, menerangkan ada perbedaan pendapat diantara para ulama, ada yang melarang dan memperbolehkan. Para ulama yang melarang umat muslim memilih non muslim karena para ulama tersebut ada kesamaan saat menafsirkan lafadz <i>awliya'</i> dengan penolong dan pemimpin. Sedangkan para ulama yang membolehkan umat muslim memilih non muslim sebagai pemimpin karena para ulama tersebut menganggap bahwa lafadz <i>awliya'</i> tidak sesuai konteks pada zaman ini. Kedua, Berdasarkan sudut pandang hukum Islam pada pemimpin non muslim pada masyarakat Islam, <i>fiqh al-siyasah</i> menganggap bahwa pemimpin disebut sebagai

				<p>pengganti nabi pada urusan dunia, agama dan negara, oleh sebab itu memberi kuasa pada non muslim untuk mengurus permasalahan kaum muslim ialah haram.</p>
5.	Lulu Nadziroh	<p>Pemimpin Non Muslim Menurut Ibn Taimiyah dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di DKI Jakarta Tahun 2017</p>	<p>Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2017</p>	<p>Pada skripsi ini, Ibn Taimiyah tidak menjelaskan secara detail mengenai kebolehan kepemimpinan non muslim pada masyarakat yang mayoritas muslim, tapi Ibn Taimiyah lebih menekankan pada aspek keadilan. Menurut Ibn Taimiyah, lebih baik dipimpin non muslim yang adil daripada dipimpin muslim yang dzalim. Ibn Taimiyah beranggapan bahwa pemimpin merupakan sosok yang adil dan bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat, akan tetapi pemimpin yang dzalim akan membawa kehancuran. Lalu, kaitannya dengan pilkada di DKI Jakarta merupakan keadaan darurat. Pengangkatan Ahok yang non muslim</p>

				<p>menggantikan Jokowi, berdasar pandangan Ibn Taimiyah keadaan tersebut dikategorikan sebagai darurat, karena secara otomatis Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Jika Ahok tidak menggantikan Jokowi, maka akan terjadi kekosongan pada kursi kepemimpinan, dan bisa saja memunculkan kekacauan pemerintahan pada saat itu.</p>
6.	Kerwanto	<p>Kepemimpinan Non Muslim: Konsep Wilayah dalam Al-Quran sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim</p>	<p>Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 5, No. 2, 2017 (Sinta 3)</p>	<p>Pada jurnal ini sang penulis mengungkapkan pedapatnya bahwa non muslim yang adil tidak memiliki rasa permusuhan dengan umat muslim boleh saja memimpin masyarakat muslim pada ranah Horizontal yang tidak memerlukan legitimasi ketuhanan yang sifatnya absolut, tapi cukup dengan legitimasi kemanusiaan yang sifatnya relatif. Karena yang dibentuk melalui hubungan rakyat tidak mengarah pada ketuhanan, akan tetapi mengarah pada hubungan sesama</p>

				<p>manusia yang berlandaskan kemaslahatan masyarakat.</p>
7.	Muhammad Wahyudi	<p>Kepemimpinan Non Muslim: Penafsiran Surat Al-Maidaah Ayat 51 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah</p>	<p>Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 2018 (Sinta 3)</p>	<p>Ada perbedaan penafsiran antar tokoh yakni Hamka sebagai penulis kitab Tafsir Al-Azhar dengan M. Quraish Shihab sebagai penulis Kitab Tafsir Al-Mishbah. Hamka menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai suatu larangan mutlak pada non muslim untuk dijadikan pemimpin pada masyarakat muslim. Ia beranggapan bahwa non muslim selalu ingin berbuat buruk pada muslim. Sedangkan M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bukan sebagai larangan mutlak untuk non muslim menjadi pemimpin. Menurut M. Quraish Shihab, non muslim yang bisa hidup berdampingan dan damai dengan umat muslim punya hak dan kewajiban yang sama dengan muslim, dan begitu juga dalam hak untuk menjadi pemimpin.</p>

8.	Mary Silvita	Presiden Non Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim	Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 7, No. 1, 2012	Pada jurnal ini menjelaskan bahwa mengenai kepemimpinan non muslim mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, mayoritas ulama tetap menolak kepemimpinan non muslim dalam kondisi normal. Tetapi, apabila dalam kondisi darurat seperti umat Islam mengalami penindasan pada politik, para non muslim boleh dijadikan sebagai pemimpin. Ada beberapa pendapat dari intelektual Islam bahwa negara muslim boleh memilih pemimpin non muslim karena ketentuan dari al-Qur'an dan Sunnah yang melarang kepemimpinan non muslim sudah tidak berlaku.
----	-----------------	---	---	---

Dari beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis mengetahui perbedaan dengan penelitian lain. Penelitian ini berfokus mengungkap tujuan boleh tidaknya pemimpin non muslim pada wilayah

mayoritas muslim dari sudut pandang K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya menggunakan teori hermeneutika kritis Jurgen Habermas.

E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode *library research*. Hal ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan berdasar kajian kritis dan mendalam dari sumber-sumber kepustakaan berkaitan, dengan harapan memunculkan sebuah ide dan inspirasi yang dapat melahirkan pemikiran lain.¹⁰

Pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer berasal dari argumen mengenai pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya di Youtube, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik itu jurnal, buku, skripsi, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim.

F. Teori

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika kritis dari Jurgen Habermas. Teori ini dibangun karena adanya “klaim” bahwa segala bentuk penafsiran bisa dipastikan ada pengaruh dari faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, strata kelas, gender dan suku. Konsekuensi dengan menggunakan teori hermeneutika kritis dari Jurgen Habermas ialah kita harus punya

¹⁰ Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1 (2020), 42.

kecurigaan dan kewaspadaan pada segala bentuk tafsir, jargon, maupun pengetahuan yang digunakan pada agama dan sains.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tersebut berisi beberapa bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika dari penelitian ini.

Bab kedua, landasan teori berisi tentang kepemimpinan secara umum, kepemimpinan dalam Islam, dan teori hermeneutika kritis Jurgen Habermas.

Bab ketiga, berisi penyajian data yang diuraikan oleh peneliti mengenai biografi, aktivisme pada bidang intelektual, serta pemikiran pemimpin non muslim dari K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya.

Bab keempat, berisi penjelasan konsep pemimpin non muslim dalam Islam dan menjawab rumusan masalah dengan uraian serta analisis tentang pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim menurut K.H Said Aqil Siradj dan Buya Yahya menggunakan teori hermeneutika kritis dari Jurgen Habernas.

¹¹ Malik Ahmad Nasir, "Hermeneutika Kritis (Studi Kritis atas Pemikiran Habernas), *Islamia*, Vol. 1, No. 1 (2019), 33.

Bab kelima, berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Inti dari penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terdapat pada kesimpulan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk memberikan pengaruh pada suatu kelompok. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mencapai kesepakatan guna tujuan bersama. Kepemimpinan merupakan sebuah interaksi agar bisa saling mempengaruhi antara pemimpin dengan pengikutnya. Definisi mengenai kepemimpinan ada lebih dari 400, Akan tetapi dari banyaknya pemahaman tentang kepemimpinan ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan sebagai perilaku agar bisa memberikan pengaruh terhadap orang lain. Pada dasarnya, kepemimpinan berkaitan pada suatu individu yang memberikan pengaruh pada orang disekitar untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan. Tapi, hal ini tidak bermaksud bahwa setiap orang yang bisa memberikan pengaruh untuk mencapai tujuan disebut sebagai pemimpin.¹

Kepemimpinan dibagi menjadi tiga, yakni: (1) *Self Leadership*; (2) *Team leadership*; (3) *Organizational Leadership*. *Self leadership* merupakan kemampuan untuk memimpin diri sendiri untuk mencapai tujuan dan menghindari kegagalan dalam kehidupan. Kemudian, *team leadership* merupakan kemampuan memimpin orang lain. Sebagaimana pemimpinnya

¹Fridayana Yudiatmaja, "Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya", *Media Komunikasi*, Vol. 12, No. 2 (Agustus 2013), 30.

dikenal sebagai *team leader* yang paham mengenai tanggung jawabnya, memahami keadaan pengikutnya, mengemban konsekuensi, dan juga punya komitmen untuk membawa pengikutnya mencapai tujuan agar memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Sedangkan, *organizational leadership* apabila dilihat dari konteks suatu organisasi dipimpin oleh *organizational leader* yang bisa memahami ruang lingkup bisnis, membentuk visi dan misi, serta mampu memikul tuntutan konsekuensi guna menjadikan perusahaan memperoleh berkah bagi komunitas tingkat lokal sampai internasional.²

Untuk mewujudkan tujuan serta fungsi kepemimpinan membutuhkan suatu aktivitas kepemimpinan dan hal tersebut nantinya akan diklasifikasikan, sehingga nanti dapat terlihat bentuk-bentuk dari kepemimpinan. Ada beberapa pola kepemimpinan yang diungkapkan oleh para ahli, yakni:³

1. Tipe Otoritas (*Autocrat*)

Otokrat memiliki arti penguasaan absolut, berasal dari kata “utus” yang berarti sendiri dan “kratos” berarti kekuasaan. Tipe kepemimpinan otoritas ini bersifat mutlak dan harus dipatuhi dari sang pemimpin, yang mana segala kebijakan, aturan, dan ketetapan telah ditentukan tanpa mendengar pendapat dari pengikutnya serta harus dipatuhi. Pemimpin yang memiliki tipe otoriter pada umumnya bekerja secara sungguh-sungguh, teliti, dan cermat. Walaupun sedikit kaku dan segala perintah harus dipatuhi oleh para

² Ibid., 30.

³ Besse Mattayang, “Tipe dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis”, *Jemma*, Vol. 2 No. 2 (September 2019), 46 – 48.

pengikutnya, tetapi pemimpin bekerja sesuai dengan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

2. Tipe Peternalistik

Seorang pemimpin yang memiliki tipe penetralistik lebih mengedepankan kebersamaan dan peranannya dipenuhi harapan oleh pengikutnya. Pada umumnya, harapan itu bermaksud agar pemimpin mereka dapat berperan sebagai inti yang bisa melindungi, serta sebagai tempat mengadu agar mendapatkan petunjuk. Tipe pemimpin ini berupaya memperlakukan pengikutnya secara adil dan merata tanpa membedakan.

3. Tipe Karismatik

Pemimpin tipe karismatik memiliki pengikut dengan jumlah banyak, karena ia punya daya tarik untuk memberi pengaruh terhadap orang lain tanpa perlu menjelaskan secara detail mengapa tipe pemimpin ini sangat dikagumi. Pemimpin tipe karismatik dalam instansinya tidak memperlakukan nilai-nilai yang dianut, sikapnya cenderung otokratik namun para pengikutnya tetap setia pada pemimpinnya.

4. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan ini disegani oleh pengikutnya bukan ditakuti, karena perilaku dari pemimpin yang demokratis dalam organisasinya mendorong dan membimbing para pengikutnya agar bisa berkembang, berinovasi dengan efisien. Kepemimpinan ini sangat menghargai potensi

yang dimiliki individu, dan mau mendengarkan nasihat saat pengambilan keputusan dari pengikutnya, serta ikut bertanggung jawab atas penerapan kebijakan untuk mewujudkan tujuan.

5. Tipe Militeris

Tipe kepemimpinan ini apabila diamati dengan seksama mirip dengan tipe otoriter yang sifatnya keras, bertujuan agar bawahan patuh pada pemimpinnya. Apabila mengutip dari sekolah tinggi komando angkatan darat, definisi dari kepemimpinan militer adalah seni dan pelaksanaan menggunakan pengaruh serta memberi arahan pada para bawahan yang bertujuan untuk memunculkan kemauan, rasa percaya, respek dari pemimpin dengan memanfaatkan alat serta waktu secara efisien.⁴

Style of leadership atau gaya kepemimpinan ialah tatanan yang digunakan pemimpin untuk melakukan fungsi kepemimpinannya dalam memimpin para pengikutnya.⁵ Gaya kepemimpinan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpin dalam mengambil tindakan, keputusan, serta cara membantu para pengikutnya. Sudah banyak studi untuk melihat gaya kepemimpinan dari seseorang, salah satu pendapat yang terkenal mengenai hal ini dikemukakan oleh Blanchard. Ia mengemukakan ada 4 gaya kepemimpinan, yakni:⁶

⁴ Syam Soemanagara, "Kepemimpinan Militer: Sejarah Singkat, Nilai, Prinsip, dan Ciri Khusus", *Manajerial*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2003), 23.

⁵ Besse Mattayang, "Tipe dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis", 48.

⁶ Asep Solikin, H.M Fatchurrahman, Supardi, "Pemimpin Yang Melayani dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri", *Anterior Jurnal*, Vol.16, No. 2 (Juni 2017), 95.

1. *Directing*

Saat pengambilan keputusan, pemimpin memberikan arahan dan proses dengan detail terhadap pengikutnya. Perwujudan yang terjadi di lapangan harus sesuai dengan prosedur-prosedur dari arahan pemimpin. Gaya ini sangat cocok digunakan pemimpin apabila bawahannya dihadapkan dengan tugas yang sulit sedangkan staff belum berpengalaman menangani permasalahan tersebut.

2. *Coaching*

Pemimpin dengan gaya ini selalu memberi arahan dan instruksi yang jelas pada pengikutnya, serta mengawasi bawahannya secara langsung. Gaya kepemimpinan ini dikenal sebagai gaya pemberitahu, hal ini karena pemimpinnya secara langsung memastikan bawahannya agar bisa memperoleh hasil kerja yang maksimal dan memberi kepuasan serta kesuksesan di masa akan datang. Pemimpin dengan gaya ini menjelaskan alasan mengapa sebuah keputusan itu diambil, tidak hanya menjelaskan proses dan detailnya.

3. *Supporting*

Pemimpin dengan gaya ini akan membantu dan memfasilitasi tugas yang diberikan pada bawahannya. Pemimpin akan bertanggung jawab atas proses serta pengambilan keputusan yang telah dibagi bersama bawahannya, namun tidak memberikan arahan dengan detail. Dalam hal ini pemimpin perlu meluangkan waktu bersama bawahan atau pengikutnya

untuk membicarakan permasalahan yang akan dihadapi agar bisa terjalin komunikasi dengan baik dalam pengambilan keputusan, serta mendengarkan saran-saran mereka berkaitan dengan peningkatan kinerja.

4. *Delegating*

Gaya kepemimpinan yang dikenal dengan pengalihan tanggung jawab dari proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Gaya ini sangat efektif apabila para bawahan memiliki tingkat kesiapan dan pengalaman tinggi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Bawahan dianggap telah berkompeten serta termotivasi dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas pekerjaannya.

Dari keempat gaya yang telah disebutkan tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta sangat berpengaruh dari mana pemimpinnya berasal termasuk kesiapan dari bawahannya. Maka dari permasalahan ini muncullah istilah *situational leadership*. Gibson mengungkapkan bahwa kepemimpinan situasional ialah kepemimpinan yang membantu pemimpin mengerti kebiasaan dan situasi dari bawahan disekitarnya sebelum menentukan model kepemimpinan. Perihal yang mempengaruhi *situational leadership* ialah paham akan karakter bawahan dan mengerti situasi serta kondisi yang sedang berlangsung sebelum menentukan

bentuk kepemimpinan.⁷ Dengan adanya situasional leadership ini diharapkan agar pemimpin dapat menyesuaikan keadaan para bawahannya.⁸

B. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Pandangan al-Qur'an mengenai pemimpin sebenarnya pilihan Allah, bukan pemimpin yang dipilih berdasarkan kesepakatan manusia agar bisa dijadikan sebagai teladan bagi umat Islam sebab pilihan insan memperlebar kesalahan dan kedzaliman. Lebih lanjut, keputusan yang disepakati oleh manusia terbuka kesempatan untuk bersepakat pada perilaku maksiat, dosa, dan kedzaliman. Permasalahan mengenai hal ini banyak terbukti sepanjang sejarah manusia. Kepemimpinan merupakan proses untuk memberi pengaruh dari pemimpin kepada umat yang ia pimpin bermaksud mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya, kepemimpinan tidak bisa dianggap sebagai hal menyenangkan, sebab tanggung jawab serta amanah yang diberikan harus diemban dengan sebaik-baiknya. Permasalahan mengenai kepemimpinan telah terbukti pada sejarah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Para sahabat memberi keutamaan serta penekanan untuk diangkat sebagai pengganti beliau agar bisa memimpin umat Islam.⁹

Pada konsep kepemimpinan agama Islam, pemimpin disebut sebagai *khalifah* yang memiliki arti wakil. Akan tetapi mengalami pergeseran menjadi

⁷ Heni Hikmayani Fauzia, Bibin Rubini, Widodo Sunaryo, "Kepemimpinan Situasional dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Komitmen Guru", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2018), 609.

⁸ Asep Solikin, H.M Fatchurrahman, Supardi, "Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri", 96.

⁹ Kurniawan dkk, "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam", *PRODU*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2020), 3-4.

kata *amir* yang memiliki arti penguasa. Kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemimpin formal. Apabila merujuk pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30 yakni :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” (Al-Baqarah: 30)¹⁰

Istilah *khalifah* pada ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah seusai nabi wafat, akan tetapi penciptaan Nabi Adam yang memikul tugas memakmurkan bumi dan mengajak seluruh umat manusia berbuat baik serta menjauhi perilaku mungkar. Ayat ini menjelaskan bahwa, pada dasarnya setiap orang boleh memohon pada Allah agar menjadi pemimpin. Akan tetapi, ia harus melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan ketetapan Allah, yang tidak boleh ialah orang memohon jabatan tapi ia tidak punya potensi serta kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan.¹¹

Menurut Ibnu Khaldun, *khalifah* ialah beban untuk umat dalam sudut pandang *syara'* bagi kemaslahatan dunia serta akhirat yang akan kembali lagi. Karena hal ini memiliki sifat duniawi dalam *syara'* bisa diungkapkan sebagai kemaslahatan akhirat. Bisa dipahami bahwa hakekat dari *khalifah* ialah pengganti pemimpin *syari'at* yakni Nabi Muhammad dalam merawat agama serta dunia. Konsep kepemimpinan pada al-Qur'an tidak hanya kata *khalifah*,

¹⁰ QS:Al-Baqarah : 30

¹¹ Maimunah, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasae Konseptualnya”, *Al-Afkar* , Vol. V. No.1 (April 2017), 69.

ada juga kata Imam. Istilah Imam merupakan hasil dari derivasi dari kata *Amma-Ya'ummu* yang memiliki arti menuju, menumpu, atau meneladani.¹² Dalam konsep *Imamah*, istilah pemimpin disebut dengan imam. Seseorang yang diangkat sebagai pemimpin tidak boleh berperilaku zalim, dan tidak pernah berbuat zalim entah itu pada bidang keilmuan, pola perilaku, pengambilan keputusan serta penerapannya.¹³

Masih berasal dari kata yang sama, melahirkan kata *umm* mempunyai arti Ibu dan imam memiliki makna pemimpin. Ada beberapa pendapat bahwa istilah imam pada awalnya mempunyai arti cetakan yang membuat sesuatu sama dengan cetakan tersebut. Oleh karena itu, Imam diartikan sebagai teladan. Menurut Abu Zahrah, *imamah* dan *khilafah* memiliki arti yang sama, karena kedua istilah tersebut memiliki makna jika seseorang yang menjadi *khilafah* merupakan penguasa tertinggi bagi umat Islam. Penyebab *imam* disebut juga sebagai *khilafah*, karena para *khilafah* merupakan pemimpin yang wajib ditaati dan diikuti. Kemudian, ada pula istilah *Ulil Amri* yang berasal dari akar kata *Amir* mempunyai arti pemimpin tertinggi pada masyarakat Islam,¹⁴ Apabila merujuk pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (Al-Nisa' : 59)

¹² Ibid., 70.

¹³ Kurniawan dkk, “Konsep Kepemimpinan dalam Islam”, 3.

¹⁴ Maimunah, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasae Konseptualnya”, 71.

Istilah pemimpin pada hadis Rasulullah ditemui pada kata *Ra'in*, sebagaimana pada sebuah hadits ... راعٍ (*setiap orang diantara kamu ialah pemimpin*). Apabila menggunakan pendekatan fenomenologi huruf terkandung makna kepemimpinan dalam berbagai nilai dan karakter serta tujuan yang harus diperjuangkan. Pendekatan fenomenologi huruf kurang memuaskan jika dilihat sebagai kajian intelektual, tapi dari beberapa penelusuran bisa dijadikan acuan dan renungan dalam melaksanakan kegiatan kepemimpinan Islam.¹⁵

Berdasarkan legitimasi pada al-Qur'an, keberadaan seorang pemimpin merupakan sosok yang memiliki kedudukan kepatuhan setelah Allah dan Rasul-Nya. Kepatuhan tersebut berkaitan dengan segala hal yang telah menjadi kebijakannya, entah itu suka maupun tidak. Namun, kepatuhan tersebut masih dalam batasan dan tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemahaman mengenai kepemimpinan islami bukan sekedar seseorang yang bisa memberi pengaruh individu lain agar bersedia melakukan kegiatan, akan tetapi diiringi dengan ciri khas individu menggunakan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

Konsep kepemimpinan dalam agama Islam terdiri dari beberapa aspek:

- 1) Aspek pengaruh pada ajaran Islam, jika pemimpin tidak mempunyai pengaruh menyebabkan hilangnya rasa percaya umat terhadap seseorang yang diangkat sebagai pemimpin; 2) Aspek kerohanian, sebagai pemimpin umat

¹⁵ Moh. Subhan, "Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", *Tadris*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), 129.

¹⁶ *Ibid.*, 30.

harus punya kedudukan sebagai pemimpin agama, seperti Nabi Muhammad yang memimpin rakyat dan juga sebagai pemimpin agama; 3) Aspek karakteristik, aspek ini berfungsi untuk menilai baik dan buruknya kepemimpinan seseorang.¹⁷

Adapun ciri dan kualifikasi untuk menjadi pemimpin yang ditemukan pada khazanah Islam. Kualifikasi tersebut meliputi: 1) muslim; 2) punya keistimewaan mental; 3) kemampuan jasmani; dan 4) derajat rohaniyah. Kualifikasi jika dilihat secara pintas, memiliki kesamaan dengan kajian kepemimpinan menggunakan pendekatan sifat pada umumnya yang berhasil merumuskan beberapa sifat seseorang untuk menempati derajat kepemimpinan. Sifat tersebut meliputi: 1) kekuatan fisik dan syaraf; 2) penghayatan arah dan tujuan; 3) antusiasme; 4) integritas; 5) keramahan 6) kemampuan mengambil keputusan; 7) keahlian teknis; 8) kelihaiian dalam memimpin; 9) inteligensi; dan 10) kepercayaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kepemimpinan didasarkan pada sifat dan potensi yang dimiliki sejak lahir.¹⁸

Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim dalam buku manajemen syariah, pemimpin yang beriman harus mempunyai sifat mulia pada jiwanya agar

¹⁷ Kurniawan dkk, "Konsep Kepemimpinan dalam Islam", 5.

¹⁸ Moh. Subhan, "Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", 131.

dapat dijadikan sebagai tauladan bagi pengikutnya. Sifat-sifat tersebut meliputi :¹⁹

1. Aqidah

Saat muslim menjadi pemimpin ia akan selalu ingat pada Allah yang memberikan potensi dan keahlian padanya sebagai seorang pemimpin. Sehingga sudah menjadi kewajiban untuknya memimpin sesuai dengan ketetapan sang pencipta, agar dapat mencapai tujuan-tujuan berdasar aturan serta batasan yang telah ditentukan.

2. Ketaatan

Apabila kita benar-benar taat pada Allah, sebagai hambanya telah diperintah untuk menaati serta mengikuti Rasul-Nya yang dijadikan sebagai tauladan. Hal ini dapat ditemukan dalam surat Ali ‘Imran ayat 31 :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. Kebersihan Hati

Karena pemimpin dijadikan sebagai panutan dan tauladan bagi pengikutnya, ia harus konsisten dalam tindakan serta keputusan yang ia ambil. Konsisten diartikan sebagai berpegang teguh akan prinsip-prinsip

¹⁹ Muhammad Charis F dkk, “Kategori Kepemimpinan dalam Islam”, *Edukasi Non Formal*, Vol. 1, No. 2 (2020), 180.

dalam segala kondisi dan keadaan yang dihadapi. Allah telah berfirman pada surat Al-Fussilat ayat 30 :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian tetap (dalam pendiriannya), akan turun malaikat-malaikat kepada mereka (seraya berkata), “Janganlah kamu takut dan bersedih hati serta bergembiralah dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

Berdasarkan penelusuran khazanah Islam, pola kepemimpinan yang digunakan Islam mempunyai ciri khas, berada di antara kepemimpinan *laissez faire* dan kepemimpinan otoriter. Ciri khas ini tampak pada penggunaan prinsip Islam yang tegas dan penggunaan lembaga musyawarah (*syura*). Dengan diterapkannya *syura* ini bermaksud agar pemimpin Islam terhindar dari paradigma otoriter yang mana pemimpin dianggap sebagai pusat otoritas,²⁰ serta terhindar dari *laissez faire* yang menelantarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki arah, petunjuk, dan pengawasan, sehingga menyebabkan seluruh pihak mengambil keputusan masing-masing.²¹

Kepemimpinan Islam terletak diantara kepemimpinan *laissez faire* dan kepemimpinan otoriter dianggap sebagai dua kutub ekstrim yang berupaya

²⁰ Moh. Subhan, “Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam”, 132.

²¹ Muhammad Olifiansyah dkk, “Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”, *At-Tajdid*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2020), 107.

menunjukkan penerapan prinsip *syura*. Dengan diterapkannya *syura*, diwajibkan pada seluruh pemimpin islami agar bertukar pendapat dan pikiran dengan para bawahannya serta mendengarkan saran sebelum mengambil suatu keputusan.²²

C. Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas

Hermeneutika merupakan bagian metode berpikir dari filsafat yang sering digunakan dalam mengkaji *human science*. Hermeneutika berasal dari kata *hermeneuein* yang diambil dari bahasa Yunani, apabila diterjemahkan secara umum *to intern*, dan kata bendanya *hermeneia* memiliki arti *interpretasion* (menafsirkan).²³

Dalam bahasa aslinya, *hermeneuin* dan *hermeneia* terdapat tiga makna dasar yang menggunakan bentuk kerja verb dari *hermeneuin*, yakni (1) mengungkap kata-kata, misalnya *to say*, (2) menjelaskan, seperti menjelaskan situasi yang terjadi, (3) menerjemahkan, seperti pada bahasa transliterasi tertentu. Bauman berpendapat bahwa *hermeneutikaos* memiliki arti upaya untuk menjelaskan serta menelusuri pengertian dari suatu ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kontradiktif, dan kabur, memunculkan keraguan serta kebingungan pada pembaca dan pendengar.²⁴ Hermeneutika berfokus pada teori-teori berkaitan dengan interpretasi secara tepat terhadap teks, agar

²² Moh. Subhan, "Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam", 132.

²³ Acep Iwan Saidi, "Hermeneutika, Sebuah Cara untuk Memahami Teks", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 13, No. 7 (April 2008), 376.

²⁴ Martono, "Kajian Kritis Hermeneutika Friedrich Scheiermarcher VS Paul Ricoeur", *Edukasi Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 1 (2019), 44.

orang-orang sadar akan perbedaan mengenai teori interpretasi dan mengenal lebih jauh apa itu hermeneutika daripada yang dipikirkan.²⁵

Istilah *Hermenia* dan *Hermeneiein* sering dikaitkan dengan tokoh mitologi bernama Hermes yang bertugas menyampaikan pesan Jupiter terhadap manusia. Tugas Hermes ialah menerjemahkan pesan-pesan dari dewa agar manusia bisa memahaminya. Tugas Hermes sangat penting bagi umat manusia, apabila terjadi kesalahpahaman manusia dalam memahami isi pesan dari dewa akan berakibat fatal.²⁶

Hermeneutika yang dikaitkan dengan peran Hermes dianggap sebagai suatu ilmu dan seni dalam menginterpretasikan sebuah teks. Interpretasi terkadang disebut sebagai uraian teks, komentar, ulasan, kritik, analisis bisa didefinisikan selaras dengan tujuannya, yakni mengungkapkan makna pada suatu teks yang diteliti.²⁷

Jurgen Habermas merupakan salah satu filsuf besar yang memberikan pengaruh pada abad kontemporer dan membahas hermeneutika, lahir pada tahun 1929 di Gummersbach.²⁸ Pemikiran dari Jurgen Habermas sangat dipengaruhi oleh mazhab frankrut awal. Mazhab frankrut ialah sekolah yang mengembangkan filsafat kritis sebagai pisau analisis untuk membaca realitas sosial. Mazhab ini digolongkan menjadi dua fase yakni generasi pertama dan

²⁵ M. Ied Al Munir, "Hermeneutika sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan", *Titian*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2021), 105.

²⁶ Sembodo Ardi Widodo, "Metode Hermeneutik dalam Pendidikn", *Unisia*, Vol. XXXI, No. 70 (Desember 2008), 323.

²⁷ Martono, "Kajian Kritis Hermeneutika Friedrich Scheiermarcher VS Paul Ricoeur", 44.

²⁸ Ahmad Atabik, "Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas", *Fikrah*, Vol. 1, No.2 (Desember 2013), 451.

generasi pencerahan. Tokoh mazhab frankrut pada generasi pertama seperti Theodore Adorno, Maz Horkheimer, dan Herbert Marcuse. Pada fase ini, mazhab frankrut mengalami kebuntuan atau pesimisme pada penerapan gagasan yang mereka nyatakan. Lalu generasi pencerahan, pada fase ini teori kritis dianggap menempati puncak performnya. Tokoh pada fase ini seperti Habermas, George Luckas, Karl Korsch, dan Antonio Gramsci.²⁹

Mazhab Frankrut ini mengembangkan teori kritis yang berawal dari George Luckas dan Karl Marx sebagai tokoh utama. Melalui rasionalisasi, teori kritik mereka berupaya untuk mewujudkan rasionalitas pada segala bentuk kehidupan ekonomi, politik, sosial, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, bukan hanya permasalahan yang berkaitan dengan analisis atas segala macam pola rasionalitas dalam sejarah. Karena permasalahan ini yang menyebabkan Habermas prihatin, sehingga ia memikirkan kembali permasalahan rasionalitas dan proses rasionalitas itu, dengan membuat analisis baik atas rasio manusia maupun perwujudannya pada praksis kehidupan sosial.³⁰

Meskipun pemikiran-pemikiran Habermas tidak berfokus pada Hermeneutik, tapi gagasan-gagasan yang ia ungkapkan mendukung pustaka hermeneutik. Bahkan dalam karya-karya Habermas tidak pernah menjelaskan secara utuh pengertian dari hermeneutika, entah itu sebagai ilmu pengetahuan atau sebagai suatu gagasan tunggal, seperti tafsir terhadap sebuah teks kitab

²⁹ Ibid., 453.

³⁰ Ulumuddin, "Jurgen Habermas dan Hermeneutika Kritis", *Jurnal Hunafa*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2006), 77.

suci. Karena Habermas membawa karakter ciri khas kritis dari aliran frankrut, menyebabkan hermeneutika Habermas dikenal sebagai hermeneutika kritis yang dianggap unik atas bagaimana cara ia memahami. Dari metode ini muncul suatu klaim bahwa segala bentuk penafsiran pasti ada penyebab dan unsur-unsur politik, sosial, ekonomi, strata kelas, geneder, dan suku. Konsekuensi menggunakan metode ini kita harus curiga dan waspada pada segala bentuk tafsir atau pengetahuan dalam sains maupun agama.³¹

Hermeneutika kritis dan hermeneutika biasa punya tujuan yang berbeda. Hermeneutika kritis bukan sekedar memahami dan mereproduksi makna dari sang penulis, seperti pada Schleimacher dan Dilthey, dan bukan juga sekedar memproduksi makna baru yang terarah pada masa depan, seperti pada Heidegger dan Gaddamer. Secara umum, hermeneutika bertujuan supaya sang pembaca dapat memahami teks, akan tetapi hermeneutika kritis berupaya agar penulis paham akan teks yang ditulis sehingga ia bebas dari distorsi-distorsi, yakni dalam kasus psikoanalisis, pada kasus kritik-ideologi, dan memperoleh otonom.³²

Hermeneutik biasa yang dikembangkan oleh Dilthey dan Gadamer bisa saja berfokus pada kekaburan teks, tapi tidak sampai curiga mengenai hubungan antara kekaburan teks dan gangguan kesadaran dari sang penulis.

³¹ Maliki Ahmad Nasir, "Hermeneutika Kritis (Studi Kritis atas Pemikiran Habernas)", *Islamia*, Vol. 1, No. 1 (2019), 32.

³² F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleimacher sampai Derrida*, (Yogyakarta : Kanisius. 2015), 224.

Sedangkan, Metode hermeneutika kritis berupaya untuk mengungkap motif yang tidak disadari oleh sang penulis.³³

Untuk mengungkap motif tersebut tidak cukup memakai metode *verstehen* (memahami), tetapi memerlukan juga *erklaren* (menjelaskan). *Verstehen* berfokus pada isu yang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, sedangkan *erklaren* berfokus pada isu yang ada hubungannya dengan dunia ilmu pengetahuan alam.³⁴ Karena pada permasalahan psikopatologis memunculkan dua hal, yakni perilaku kompulsif dan pikiran kompulsif. Makna-makna yang ada pada teks tersebut menggambarkan suatu ketidakbebasan.³⁵

Pada hermeneutika kritis terdapat dua teknik yang dilakukan, yakni merekonstruksi teks dan mendorong refleksi penulis. Yang pertama ialah tugas representasi, dan yang kedua tugas analisis. Tugas pertama berupaya untuk mengungkap isi yang disembunyikan terhadap teks, lalu merekonstruksi teks yang kemudian dibangun ulang bertujuan agar masa silam hadir kembali dihadapan pembaca serta penulis. Rekonstruksi teks merupakan tugas dari *Verstehen*. Tugas kedua yakni analisis, berupaya untuk menemukan alasan mengapa teks tersebut dihasilkan, hal ini menjadi ciri khas dari hermeneutika kritis, sebab analisis bisa menggali tujuan-tujuan serta motif tak sadar dari sang penulis.³⁶

³³ Ibid., 227.

³⁴ Malki Ahmad Nasir, "Hermeneutika Kritis (Studi Kritis atas Pemikiran Habermas)", 33.

³⁵ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleimacher sampai Derrida*, 227.

³⁶ Ibid., 228.

BAB III

PEMIKIRAN PEMIMPIN NON MUSLIM DARI K.H. SAID AQIL SIRADJ DAN BUYA YAHYA

A. Biografi K.H. Said Aqil Siradj

K.H. Said Aqil Siradj lahir pada 3 Juli 1953 di Cirebon, keluarganya berkultur pesantren dan sangat memprioritaskan pendidikan sehingga pendidikan beliau tidak berhenti pada jenjang S1, akan tetapi hingga S3.¹ Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi'in Kempek Paliman Cirebon. Pondok pesantren tersebut didirikan pada tahun 1908 dan dirintis oleh Kiai Harun. Setelah Kiai Harun wafat pada 1957, diteruskan oleh putra pertamanya yakni Kiai Yusuf yang sekaligus menantu Kiai Munawir dari Jakarta, kemudian diteruskan oleh Kiai Umar dan Kiai Nasir. Pada generasi Kiai Nasir ini Pondok Pesantren Kempek mulai dikelola. Penerus mereka ialah Kiai Ja'far Shodiq Aqil Siroj, Kiai Said Aqil Siroj, Kiai Musthafa Aqil Siroj, Kiai Ahsin Aqil Siroj, dan Kiai Ni'am Aqil Siroj.²

Kiai Said Aqil Siradj mengawali pendidikan di pesantren ayahnya yang masih menggunakan pola tradisional, sembari Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1965, lalu melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'en Lirboyo Kediri sampai selesai tingkat menengah atas tahun 1970. Setelah menimba ilmu dari pesantren salaf (tradisional) yang diasuh oleh

¹ Hasan Baharun, Farah Nuril Badriyah, "Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj", *Tafaqquh*, Vol. 8, No. 1 Juni (2020), 40.

² Budi Harianto, "Relasi Teologi Aswaja Dengan HAM Perspektif Kiai Said Aqil Siroj", *Humanistika*, Vol. 4, No. 2 Juni (2018), 25.

pamannya, K.H. Mahrus Ali tersebut, Kiai Said kemudian melangkah kakinya ke kota Yogyakarta untuk mengais ilmu dari K.H. Ali Ma'shun di Pondok Pesantren Krpyak, sembari studi di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.³ Karena Kiai Said tumbuh di lingkungan pesantren, menjadikan ia orang yang bertoleransi, menyayangi yang lebih muda, serta menghormati sosok yang lebih tua. Apabila sikap ini diterapkan pada bidang pendidikan, terutama pada bingkai Nusantara akan benar-benar menyejukkan hati dan membentuk negeri ini aman, makmur, serta sentosa.⁴

Karena merasa belum puas menuntut ilmu di Yogyakarta, Kiai Said memantapkan hati dan pikiran untuk mencari ilmu ke Timur Tengah pada tahun 1979. Pada tingkat lisanis (S1), beliau kuliah di Universitas King Abdul Al-Aziz yang sekarang dikenal sebagai Ummu al-Qura dan berhasil selesai pada tahun 1983. Kemudian, beliau melanjutkan pada tingkat S2 di Universitas yang sama dan selesai pada tahun 1987, dengan judul tesis *Rasail al-Rusul fi Al-Ahdi Al-Jadid wa Atsaraha fi Inhiraf al-Masihiyah* (Surat-surat Para Rasul pada Perjanjian Baru dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Agama Kristen).⁵

Kecakapannya terlihat saat beliau puncak studi S-3, ketika ujian munaqasyah (promosi) doktor dengan disertasi yang berjudul "*shillatullahi bil-kaun fit-tashawwuf al-falsafi*" (Relasi Tuhan dengan Alam Kosmos: Perspektif Tasawuf Filosofis). Disertasi beliau benar-benar menggemparkan

³ Ibid., 25.

⁴ Hasan Baharun, "Pendidikan Multikultural", 40.

⁵ Budi Harianto, Nurul Syalafiyah, "Aswaja An-Nahdliyah Sebagai Representif Teologi Islam Nusantara Perspektif Kiai Said Aqil Siroj", *Kontemplasi*, Vol. 7, No.2 Desember (2019), 257.

Ummu al-Qura yang melarang diskursus tasawuf filosofis. Menakjubkannya, Kiai Said bisa mempertahankan predikat terpuji (*mumtaz, cum laude*), serta menyelesaikan studi tersebut pada tahun 1994.⁶

Kemudian, beliau pulang ke Indonesia dan langsung diberi kepercayaan sebagai Wakil Katib 'Aam Shuriyah PBNU hasil Mukhtamar Cipasung pada tahun 1994, hal ini yang menyebabkan Kiai Said semakin dikenal oleh khalayak umum, lebih-lebih pada kalangan Nahdliyin.⁷ Namun belum mencapai 3 bulan memegang amanat tersebut, ada beberapa kelompok yang merasa kurang puas atas keputusan Mukhtamar Cipasung. Kang Said sempat dianggap sebagai agen syi'ah. Gagasan yang Kiai Said sampaikan dihadapan PMII mengenai latar belakang lahirnya *Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah* memperoleh kritikan pedas dari berbagai kalangan.⁸

Kiai Said sering menyampaikan wacana kontroversial yang dianggap berani dan keluar dari pakem ortodoksi dari kalangan masyarakat Nahdliyin adapun kebanyakan warganya bermotif konservatif. Sekitar 12 Kiai menganggap beliau kafir, akan tetapi saat diadakan tabayyun yang dihadiri para Kiai NU, Kiai Said memperlihatkan kecerdasannya dalam memahami ilmu, ideologi, serta pengetahuan mengenai Islam. Pada akhirnya, PBNU mengadakan pertemuan untuk merekonstruksi Aswaja yang dianggap sebagai doktrin sakral. Sudut pandang ulama terdahulu mengenai relevansi agama dengan negara sampai saat ini tetap dijaga dan dilestarikan oleh generasi

⁶ Budi Harianto, "Relasi Teologi Aswaja", 26.

⁷ Budi Harianto, Nurul Syalafiyah, "Aswaja An-Nahdliyah", 258.

⁸ Ibid.

ulama NU dibawah pengawasan Kiai Said. Sudah jelas bahwa sikap NU ialah konsisten serta berkomitmen pada UUD 1945 dan Pancasila.⁹

Dua tahun setelah kejadian tersebut, beliau kembali menjadi sorotan publik setelah berkhotbah di Gereja Algonz Surabaya. Sama seperti kasus sebelumnya, banyak para kyai yang mengecap beliau sebagai kafir padanya. Permasalahan tersebut pada akhirnya membuktikan keluasan serta kedalaman ilmu Kiai Said. Bukan hanya umat Islam atau warga NU yang perlu belajar agama dari beliau, tapi orang non muslim juga membutuhkan nasihat-nasihatnya, supaya menjadi baik dan benar sebagai pemeluk agama. Oleh sebab itu, praktis kesibukan Direktur dan Guru Besar Pascasarjana Universitas Islam Malang, serta sebagai dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Surabaya itu semakin meningkatkan frekuensinya.¹⁰

Aktivitas Kiai Said Aqil Siroj mulai terlihat di ranah nasional saat mengemban amanat sebagai wakil ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998, penasihat Pusat Kajian Timur dan Islam Universitas Indonesia, sampai akhirnya dipercaya sebagai ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus pembantaian dukun santet Banyuwangi. Lalu, karir Kiai Said benar-benar melesat saat berada di jajaran

⁹ Hasan Baharun, "Pendidikan Multikultural", 41.

¹⁰ Budi Harianto, "Relasi Teologi Aswaja", 26.

PBNU, setelah partai PKB berdiri, Kiai Said naik menjadi Katib' Aam Syuriah pada tahun 1999.¹¹

Kemudian, Kiai Said terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 melalui Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada muktamar NU ke-33 tahun 2015 yang berlokasi di Jombang, Kiai Said Aqil Siroj dipercaya kembali untuk mengemban amanat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Pada tahun sebelumnya yakni 2014, Kiai Said Aqil Siradj diangkat sebagai Guru Besar Bidang Tasawuf Falsafi UIN Sunan Ampel Surabaya. Lalu pada tahun 2019, beliau terpilih sebagai *Vice President Religion For Peace* (Wakil Presiden Organisasi Lintas Agama Seluruh Indonesia) masa jabatan 2019 – 2024.¹²

Selain menjabat sebagai pengurus NU, Beliau juga seorang pendakwah yang mempunyai visi dan misi tersendiri dalam menjadikan Indonesia sebagai negeri berbudaya, tentram, serta makmur. Terlihat jelas dari aktivitas keseharian beliau yang mengaktualisasikan pemikiran dakwahnya, karena pada dasarnya dakwah ialah ikhtiar untuk mengajak pada hal kedamaian, kebaikan secara menyeluruh, entah itu mengajak secara personal maupun sosial, baik dengan tulisan ataupun perilaku.¹³

¹¹ Ibid., 27.

¹² Budi Harianto, Nurul Syalafiyah, "Aswaja An-Nahdliyah", 259.

¹³ Hasan Baharun, Farah Nuril Badriyah, "Pendidikan Multikultural", 41.

Suara dakwah dan pesatuan selalu ia gelorakan pada setiap orasi yang beliau sampaikan, hal ini menjadi ciri khas dari Kiai Said. Sehingga banyak penghargaan nasional maupun internasional atas nama cendekiawan muslim perdamaian yang diperoleh beliau. Hal itu telah terbukti pada tahun 2011, penerbit Republika menobatkan penghargaan atas nama Cendekiawan Muslim Perdamaian. Pada tahun 2009, dunia internasional juga memlihi Kiai Said sebagai sosok tokoh yang mempersatukan umat, dan pada tahun 2017 juga tercatat sebagai tokoh perubahan dunia perdamaian.¹⁴

Beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh Kia Said Aqil Siradj, diantaranya : *Rasail al-Rusul fi al-'Ahdi al-jadid wa Atsaruha fi al-Masihiyah* (Pengaruh Surat-Surat Para Rasul dalam Bibel Terhadap Perkembangan Agama Kristen), thesis dengan memperoleh nilai memuaskan (1987), *Allah wa Shillatuhu nbi al-Kaun fi al-Tasawwuf al-Falsafi* (Hubungan Antara Allah dan Alam Perspektif Tasawwuf Falsafi), disertasi dengan nilai Cum Laude (1994), *Ahlussunah wal jama'ah*; dalam Lintasan Sejarah (1999), *Kyai menggugat* (1999), *Ma'rifatullah*; Pandangan Agama-Agama, Tradisi dan Filsafat (2003), *Tasawuf sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam sebagai Inspiorasi bukan Aspirasi* (2006), aktif menulis dalam berbagai media 1995-sekarang, dan karya pada saat pengukuhan Guru Besar yaitu: *Tasawuf sebagai Revolusi Spiritual dalam Kehidupan Masyarakat Modern*.¹⁵

¹⁴ Lufaeafi, "Reaktualisasi Dakwah Wali Songo: Gerak Dakwah KH. Said Aqil Siroj Dalam Menebar Islam *Rahmatal lil alamin*", *Aqlam*, Vol. 3, No. 1 Juni (2018), 105.

¹⁵ Budi Harianto, Nurul Syalafiyah, "Aswaja An-Nahdliyah", 260.

B. Pemikiran K.H. Said Aqil Siradj Tentang Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim

Kajian mengenai kepemimpinan non muslim pada wilayah mayoritas muslim terus menjadi isu pembahasan yang kontroversial. Permasalahan ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dari beberapa negara yang mengikuti asas tengah, pada hal ini bukan sebagai negara agama ataupun negara sekuler. Walaupun pada dasarnya dalam negara, pendapat paling banyak menjadi suatu kesepakatan, akan tetapi bukan bermaksud mengacuhkan pendapat dari minoritas, karena pada suatu negara hak-hak warga menyesuaikan pada bentuk negara yang dijalankan.¹⁶

Kiai Said berpendapat bahwa non muslim memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala negara. Masing-masing warga negara punya hak dan derajat yang sama didepan hukum. Oleh sebab itu, setiap warga negara baik yang muslim maupun non muslim berhak untuk memilih dan dipilih menjadi kepala negara. Pendapat dari K.H. Said Aqil Siradj berdasar pada teori imamah yang menurut bukan bagian dari *ushul al-din*. Konsep serta penerapan imamah yang ada pada kitab fikih masih terbuka dan harus diselaraskan dengan keadaan masyarakat modern kini.¹⁷

Dalam wawancara yang disiarkan melalui channel YouTube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, Kiai Said memaparkan bahwa pemimpin non muslim yang adil jauh lebih baik dari pemimpin muslim tapi dzolim.

¹⁶ Ahmad Khoiron Minan, Nizar Afifi, "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist", *At-Turas*, Vol. 7, No.1 (2020), 32.

¹⁷ Izzul Madid, "Dinamika Pemikiran Ulama dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2018), 21-22.

Pernyataan yang disampaikan ini mengutip dari pendapat ulama besar yakni Ibn Taimiyah. Kiai Said memaparkan nash mengenai permasalahan ini, yakni “Persoalan-persoalan manusia itu bisa tegak dengan baik di dunia hanya dengan keadilan”, “Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil walaupun negara tersebut dipimpin oleh seorang non muslim (kafir) dan Allah tidak akan memperkuat negara dzolim walaupun dipimpin oleh orang Islam”. Beliau juga menambahkan, jika ada dua calon pemimpin yang satu muslim dan non muslim, akan tetapi keduanya sama-sama memenuhi syarat, memiliki integritas, mampu, adil, kita harus mengutamakan orang muslim. Apabila calon pemimpin muslim ini tidak memenuhi syarat dan jauh lebih baik non muslim, maka pilihlah yang jauh lebih baik ini.¹⁸

Pemimpin non muslim yang adil jauh lebih baik dari pemimpin muslim tapi dzolim, pendapat yang Kiai Said ungkapkan ini mengutip dari pemikiran Ibn Taimiyah ini mempunyai maksud bahwa pada bidang politik serta kenegaraan, lebih mengutamakan pemikiran tentang keadilan universal dibandingkan segala-galanya, termasuk kepercayaan seseorang. Secara aspek kepemimpinan dan kewarganegaraan tetap menganggap manusia sebagai individu yang terbebas dari ideologi, adat, asal daerah, kebudayaan, serta agama.¹⁹

Pendapat ini dianggap sebagai bentuk kritik terhadap doktrin ke khalifahan yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Dalam doktrin ini dirasa

¹⁸ TVNU Televisi Nahdlatul Ulama, 2016, 3 Mei, “KH Said Aqil Sirodj: Pemimpin Muslim atau Non Muslim”. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=y6FsFZw7gqc&t=20s>

¹⁹ Abu Tholib Khalik, “Pemimpin Non Muslim dalam Perspektif Ibn Taimiyah”, *Analisis*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2014), 73.

tidak mempunyai kecocokan dan tidak penting lagi untuk diyakini serta diimplementasikan kepada masyarakat dalam suatu negara yang mempunyai beragam kepercayaan. Karena pada masyarakat dengan beragam keyakinan ini mempunyai kesamaan dalam hak dan kewajibannya menjadi pemimpin ataupun yang dipimpin, tanpa perlu adanya diskriminasi maupun perbedaan diantara suatu kelompok tertentu. Sedangkan di al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas bahwa memuliakan manusia bukan berdasar pada garis keturunan serta kebangsaan, melainkan berdasar ketaqwaan.²⁰

C. Biografi Buya Yahya

Yahya Zainul Ma'arif atau lebih akrab dipanggil Buya Yahya lahir pada tanggal 10 Agustus 1973 di Blitar, Jawa timur. Saat ini, Buya Yahya beserta keluarga tinggal di komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Buya Yahya menempuh pendidikan dasar sampai SMP diselesaikan di kota kelahirannya. Pada waktu yang sama, beliau belajar pendidikan agama di Madrasah Diniyah didampingi oleh seorang guru yang sholeh, yakni Al-Murabbi K.H. Imron Mahbub di Blitar. Kemudian, Buya Yahya melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Darullohhoh Waddakwah yang berlokasi di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Haan bin Ahmad Baharun pada tahun 1988 sampai 1993.²¹

Pada tahun 1993 sampai 1996, Buya Yahya mengajar di Pondok Pesantren Darullughoh Waddakwah sebagai masa pengabdianya pada guru

²⁰ Buya Yahya, "*Fiqih Puasa Praktis*", (Cirebon : Pustaka Al-Bahjah, 2020), 56.

²¹ Ibid., 56.

dan pesantren tempat beliau menuntut ilmu. Setelah masa abdi Buya Yahya selesai, beliau berangkat ke Universitas Al-Ahqof (Tarim, Hadhramaut – Yaman) di bawah pengawasan Al-Murabbi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, atas perintah dari Sang Guru Al-Murabbi Al-Habib Hasan Baharun sampai akhir 2005.²²

Pada awal 2006, Buya yahya diberi tugas oleh gurunya, Rektor Universitas Al-Ahgaff, Yaman, Profesor Doktor Habib Abdullah bin Muhammad Baharrun untuk memimpin Pesantren Persiapan guna mahasiswa sebelum berangkat kuliah ke Universitas Al-Ahgaff di Yaman. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, beliau mengontrak tempat di Ponpes Nuurussidiq, Tuparev, Cirebon, dan berlangsung sampai pertengahan tahun 2006. Semasa itu, Buya Yahya belum memperoleh izin dari gurunya untuk berdakwah pada masyarakat.²³

Akhir 2006, Buya Yahya menghadap gurunya di Yaman dan semenjak itu beliau memperoleh izin untuk berdakwah kepada masyarakat. Beliau mengawali dakwah dari hal kecil, apa adanya, dan tidak ada unsur paksaan. Dengan penuh rasa sabar, Buya Yahya mengisi dakwah di musala-musala kecil sampai akhirnya diberi jalan oleh Allah untuk membuka majelis taklim di masjid terbesar Cirebon, Masjid At-Taqwa, setiap hari Senin malam

²² Ibid., 57.

²³ Syibli Maufur, “Analisis Tindak Tutur Buya Yahya dalam Interaksi Belajar Mengajar di Pesantren Al-Bahjah Cirebon”, *Holistik*, Vol. 14, No. 2 (2013), 91.

Selasa. Majelis yang awalnya hanya dihadiri oleh 20 orang sampai saat ini jamaahnya memenuhi setiap sudut ruangan, dan halaman masjid.²⁴

Selain itu, Buya Yahya juga membuka puluhan majelis taklim bulanan di berbagai tempat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan JABODETABEK. Dakwah yang dilakukan Buya Yahya tidak hanya sebatas pada masjid-masjid, akan tetapi juga berdakwah di beberapa swalayan dan toserba. Majelis yang Buya Yahya pimpin memiliki nama Majelis Al-Bahjah selaras dengan nama pesantren saat ini beliau rintis.²⁵

Beliau dianggap fenomenal karena dengan waktu yang bisa dibilang singkat dapat memberikan pesona dakwah di wilayah Cirebon, sedangkan beliau bukan pribumi atau masyarakat asli dari daerah kota ini. Dengan kemampuan dakwah Buya Yahya miliki dapat memberikan warna tersendiri di tengah pusaran kiai pribumi yang asalnya dari pondok pesantren Cirebon.²⁶ Saat ini Buya Yahya aktif melakukan dakwah di masyarakat serta mengasuh majelis dan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah yang tersebar di beberapa kota besar Indonesia.²⁷

²⁴ Ibid., 92.

²⁵ Ibid., 93.

²⁶ Ibid., 81.

²⁷ Buya Yahya, *Fiqh Puasa Praktis*, 58.

D. Pemikiran Buya Yahya Tentang Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim

Permasalahan mengenai hukum menjadikan non muslim sebagai pemimpin di kalangan umat Islam menjadi objek pembahasan yang penuh kontroversi dan selalu memikat perdebatan di kalangan para ahli, berlangsung dari dahulu sampai saat ini. Pemicu dari perdebatan tersebut ialah baik pada al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber hukum utama umat Islam, terdapat dalil-dalil yang melarang umat muslim memilih non muslim sebagai pemimpin, dan ditemukan juga dalil-dalil lain yang membolehkan.²⁸

Perbedaan penafsiran dan sudut pandang dari para ulama mengenai dalil-dalil yang dikatakan bertentangan dalam menilai berlaku atau tidaknya dalil tersebut tentang umat muslim memilih non muslim sebagai pemimpin pada era kontemporer saat ini memunculkan berbagai pendapat.²⁹ Dari beragam pendapat dan dalil tentang penolakan memilih pemimpin non muslim yang dikemukakan oleh para ulama bersumber dari al-Qur'an dan hadis, dianggap sebagai suatu perintah agama.³⁰ Buya Yahya merupakan salah satu pemuka agama yang menolak non muslim dijadikan sebagai pemimpin.

Pada sesi tanya jawab kajian Kitab Al-Hikam Ibn Athoillah As-Sakandary yang disiarkan di channel YouTube Al-Bahjah Tv, Buya Yahya Menjelaskan makna dari surat Al-Mumtahanah ayat 1, menurut beliau bisa dikaitkan dengan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa haram

²⁸ Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non Muslim", 61.

²⁹ Ibid., 62.

³⁰ Ibid., 68.

hukumnya umat muslim memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan juga musuh Allah dari orang-orang beriman. Akan tetapi, tegakkan kebenaran dengan melakukan jihad dijalan Allah untuk mencari ridho dan segala hal yang dilakukan untuk-Nya. Perlu dituntut ketulusan dalam urusan kepemimpinan.³¹

Lebih Lanjut, Buya Yahya menerangkan pada chanel YouTube Al-Bahjah TV yang berjudul “Masihkah Anda Akan Memilih Pemimpin Non Muslim?” bahwa orang yang bukan memeluk agama Islam menjadi pemimpin umat muslim, maka keharaman dan kekafiran akan mudah disebarkan. Pemimpin yang bukan berasal dari umat muslim sangat membahayakan, bukan dari ahlak saja tetapi juga dengan keimanan dan segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tujuannya.³²

Kemudian, pada sesi tanya jawab “Kajian Spesial Ramadhan Bersama Al-Bahjah Halaqah Fajar” yang disiarkan di channel YouTube Al-Bahjah Tv, beliau menjelaskan bahwa kita tidak boleh memilih, mengangkat, menjadikan seorang non muslim sebagai pemimpin. Akan tetapi, apabila dalam suatu tatanan itu sudah ada pemimpin yang non muslim, kita tidak boleh merusak tatanan tersebut. Jika dalam suatu tatanan tersebut pemimpinnya non muslim, kita sebagai umat muslim tidak boleh patuh pada ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Lalu dalam menanggapi pendapat “Lebih baik pemimpin non muslim yang adil, daripada pemimpin muslim yang tidak

³¹ Al-Bahjah Tv, 2016, 15 Maret, “Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim – Buya Yahya Menjawab”. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4esUrcmDnuI>

³² Al-Bahjah Tv, 2017, 5 April, “Masihkah Anda Memilih Pemimpin Non Muslim??”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ORvGnLIZtJs&t=286s>

adil”, menurut beliau pendapat ini bukanlah perbandingan yang sebanding dan pendapat ini berasal dari ulama-ulama munafik sehingga menimbulkan fitnah.³³



³³ Al-Bahjah Tv, 2019, 19 Mei, “Hukum Masyarakat Muslim Dipimpin Oleh Orang Non Muslim – Buya Yahya Menjawab”. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BXdBG3VzOfc>

BAB IV

PEMIMPIN NON MUSLIM PADA WILAYAH MAYORITAS MUSLIM MENURUT KIAI SAID AQIL SIRAJ DAN BUYA YAHYA PERSPEKTIF HERMENEUTIKA KRITIS JURGEN HABERMAS

A. Konsep Pemimpin Non Muslim dalam Islam

Saat ini, dalam memilih seorang pemimpin tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Al-Ghazali berpendapat bahwa etika politik dalam Islam kukuh terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang memiliki dua hubungan berbeda, yakni horisontal dan vertikal. Apabila dua hal berbeda ini dikaitkan dengan pemimpin, maka setiap pemimpin hendaknya memiliki hubungan vertikal yaitu pemimpin harus patuh dan taat pada setiap perintah Allah serta menjauhi segala larangan yang telah ditentukan. Sedangkan pada hubungan horizontal, pemimpin harus bertanggung jawab pada masyarakat yang ia pimpin bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki moral dan berasaskan agama.¹

Pada tradisi pemikiran agama Islam, terdapat tiga permasalahan yang kerap kali dibicarakan mengenai kepemimpinan politik pada suatu negara. Pertama, permasalahan tentang pemimpin yang kurang layak. Kedua, persoalan pemimpin yang seringkali berbuat maksiat. Ketiga, soal pemimpin yang tidak memeluk agama Islam, bisa disebut non muslim. Pada fikih klasik, permasalahan pemimpin non muslim jarang sekali dibahas, sebab pada masa itu umumnya para intelektual muslim tidak memperbolehkan, entah itu secara

¹ Ahmad Khoirun Minan, Nizar Afifi, "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist", *At-Turas*, Vol. 7, No. 1 (Januari-Juni 2020), 33.

historis dan normatif. Apabila dilihat dari sudut normatif, mereka mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an yang mengharamkan non muslim dijadikan sebagai pemimpin. Jika melihat sejarah, mereka merujuk pada realitas bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengangkat, mejadikan, non muslim sebagai gubernur maupun panglima. Begitupun juga para khalifah, mulai dari zaman Abu Bakar hingga Usman tidak pernah menjadikan non muslim sebagai panglima maupun gubernur.²

Tetapi pada perkembangannya, diskursus mengenai pemimpin non muslim menjadi wacana yang penuh kontroversi, entah itu pada konsep serta implementasi, terutama negara-negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam. Permasalahan ini semakin keruh saat hendak diadakan pemilihan kepala negara maupun daerah, yang mana masyarakat kerap kali resah karena perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya umat muslim mendukung calon pemimpin non muslim. Ada dua pandangan yang berbeda, pertama, golongan yang mengungkapkan bahwa non muslim tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin, dan kedua, golongan yang membolehkan non muslim dijadikan sebagai pemimpin.³

Dengan munculnya dua sudut pandang yang berbeda mengenai permasalahan ini menunjukkan adanya celah pemikiran, dan bisa saja terjadi pergeseran paradigma antara ulama abad klasik dan abad modern dalam mengartikan gagasan-gagasan al-Qur'an mengenai permasalahan ini. Faktor

² Dede Rodin, "Kepemimpinan Non Muslim dalam Perspektif Al-Quran", *Mutawatir*, Vol. 7, No. 1 Juni (2017), 29.

³ *Ibid.*, 30.

utama munculnya perubahan ini tentu saja berasal dari perbedaan latar ruang dan waktu. Permasalahan ini masih berada ditahap perdebatan dan selalu menjadi tema hangat sebab topik ini berkaitan dengan kepemimpinan yang tidak bisa lepas dari politik kekuasaan , serta adanya kekuasaan kerap kali memunculkan tindakan korup.⁴

Berdasarkan pada ayat-ayat yang terdapat pada al-Quran, seperti QS. al-Maidah/ 5:57, QS. Ali-Imran/ 3: 100 da 118, QS. Al-Mumtahanah/ 60: 1, QS. Al-Mujadilah/ 58: 22, QS. Al-Nisa/ 4: 141 dan 144, QS. Al-Anfal/ 8: 71, 73 dan QS. Al-Taubah/ 9: 8 dan 71, sebagian mufassir berkesimpulan bahwa umat muslim haram hukumnya mengangkat dan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Karena dianggap sebagai pengingkaran perintah suci dari Allah serta kepatuhan pada pemerintahan yang kufur dan berlawanan dengan Allah.⁵

Disamping itu, permasalahan tentang boleh atau tidaknya non muslim menjadi pemimpin, bermula dari pemahaman yang berbeda saat mengartikan kata *wali*. Beberapa kelompok mengartikannya sebagai pemimpin, sementara kelompok lainnya mengartikan istilah tersebut hanya sebatas penolong, teman, aliansi dan partner. Bisa dikatakan istilah tersebut tidak mengkhususkan larangan kepemimpinan non muslim atas kaum muslim.⁶

⁴ Ibid., 31.

⁵ Kerwanto, “Kepimpinan Non-Muslim: Konsep Wilayah dalam al-Qur’an sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim”, *Kontemplasi*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2017), 377.

⁶ Dede Rodin, “Kepemimpinan Non Muslim”, 35.

Seluruh makna dari kata *wali* merujuk pada makna “kedekatan”. Oleh sebab itu, setiap individu yang punya kedekatan dengan pihak lain bisa disebut sebagai *wali*. Begitu juga seorang pemimpin disebut sebagai *wali*, sebab dia dekat dengan rakyatnya, mendengar segala keluh kesah dan mampu mengatasi segala kesulitan yang rakyat hadapi.⁷

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa meskipun *auliya*’ dapat diartikan sebagai pemimpin, akan tetapi istilah tersebut lebih mengarah pada kedekatan (pertemanan) yang meleburkan perbedaan-perbedaan antar golongan. Ia berpendapat bahwa, eksistensi dan sikap non muslim terhadap umat Islam tidaklah sama; ada yang bersikap negatif dan ada juga yang netral. Oleh sebab itu, sikap umat Islam terhadap mereka juga semestinya disesuaikan dengan sikap mereka tersebut. Larangan non muslim dijadikan sebagai pemimpin mengacu pada golongan mereka yang secara terang-terangan dan diam-diam memusuhi umat Islam. Ia mengacu pada analisis surat Ali-Imran ayat 28. Dengan demikian, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat mengenai pemimpin non muslim bersifat kontekstual dan situasional. Pengangkatan pemimpin non muslim tidak ada hubungannya dengan *auliya*. Larangan tersebut hanya berlaku pada golongan non muslim yang memusuhi umat Islam.⁸

⁷ Ibid., 36.

⁸ Munawir, “Kepemimpinan Non Muslim dalam Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab”, *Magzha*, Vol. 2, No. 2 (2020), 112

Paling tidak ada lima alasan yang menyebabkan pemimpin non muslim menjadi kontroversial.⁹

1. Al-Quran sebagai sumber hukum utama Agama Islam, ada beberapa ayat melarang kaum muslim memilih pemimpin non muslim, dan ditemukan juga beberapa ayat yang memperbolehkan.
2. Adanya perbedaan sudut pandang dalam mengartikan fungsi kepala negara. Beberapa memiliki pendapat jika kepala negara dalam komunitas Islam harus muslim, karena dianggap sebagai pengganti kenabian dalam permasalahan agama serta keduniaan. Sedangkan mereka yang menolak fungsi kepala negara sebagai pengganti kenabian tidak mengharuskan kepala negara harus memeluk agama Islam.
3. Terdapat berbagai pendapat tentang dasar negara. Beberapa kalangan berpendapat bahwa negara yang didirikan oleh kaum muslim, harus sesuai dengan ideologi Islam dan kepala negara berasal dari umat muslim, begitu juga sebaliknya.
4. Terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Beberapa kalangan beranggapan hanya kaum muslim yang berhak menjadi khalifah dan kepala negara. Sedangkan kalangan yang memandang khalifah secara terbuka tidak mengharuskan seorang khalifah atau kepala negara harus seorang muslim, asal ia punya prestasi, kpasitas, dan akseptabilitas sebagai khalifah.

⁹ Ibid., 31.

5. Adanya perbedaan sikap serta pandangan terhadap kedudukan masyarakat non muslim. Beberapa kalangan memposisikan non muslim sebagai kaum yang menduduki masyarakat kelas dua, bahwa non muslim tidak diperbolehkan memimpin atas kaum muslim. Sedangkan kalangan yang memposisikan non muslim dalam komunitas Islam sebagai sesama warga, memperoleh jaminan atas hak-hak politik yang dimiliki secara utuh, memperbolehkan non muslim menjadi pemimpin dalam komunitas Islam.

Perdebatan mengenai pemimpin non muslim terjadi pada tahun 2017, saat pemilihan gubernur DKI Jakarta Indonesia, sebab pada perhelatan tersebut ada dua calon kandidat yang memiliki perbedaan agama pada calon gubernur. Anies Rasyid Baswedan (muslim)- Sandiaga Salahuddin Uno (muslim) melawan Basuki Tjahaja Purnama (non muslim) – Djarot Saiful Hidayat (muslim), bukan hanya pertarungan visi misi dalam membangun DKI Jakarta, akan tetapi melibatkan agama di dalamnya yang mana muncul kasus “penodaan agama” dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama. Walaupun banyak pihak yang tidak setuju jika pada pemilihan gubernur DKI Jakarta dikaitkan dengan nuansa agama, tapi faktanya isu-isu agama sangat kental digunakan untuk mendukung serta menyudutkan salah satu pihak tertentu.¹⁰

B. Analisis Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas

¹⁰ Hasse J, “Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia” *Al-Ulum*, Vol, 18, No. 1 (2018), 75.

Selanjutnya yakni analisis mengenai pemimpin non muslim menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya perspektif hermeneutika kritis Jürgen Habermas. Berupaya menjelaskan motif-motif tersembunyi dari dua tokoh tersebut yang bisa dikatakan pendapatnya berlawanan.

Berdasarkan objek pertama yakni dari Kiai Said Aqil Siradj, beliau memperbolehkan pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim. Beliau dikenal sebagai sosok dengan pemikiran moderat dan mampu mempersatukan umat serta berupaya mencari jalan tengah dari berbagai aliran dengan menggunakan pemikiran agama yang meliputi segala aspek kehidupan. Kiai Said merupakan alumni dari Fakultas Ushuluddin, yang banyak mempengaruhi pemikirannya.

Ilmu Ushuluddin bertujuan mempelajari dasar-dasar agama Islam, dan segala hal yang berkaitan dengan iman yang berperan penting dalam membentuk manusia.¹¹ Dari masa ke masa, ilmu Ushuluddin berupaya menjawab permasalahan yang muncul sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini.¹²

Mengenai kepemimpinan, K.H. Said Aqil Siradj mengutamakan aspek kejujuran serta keadilan. Sebab, pemimpin daerah maupun pejabat muslim dari negara beliau berasal banyak yang berperilaku dzalim, seperti korupsi yang merugikan rakyat, kolusi, dan nepotisme dalam bernegara. Beliau mengutip pendapat dari Ibn Taimiyah, yakni :

¹¹ Farid Wajdi Ibrahim, "Ilmu-Ilmu Ushuluddin Menjawab Problematika Umat Islam Dewasa Ini", *Ar-Raniry*, Vol. 1, No, 1 (2014), 55.

¹² Nurul Djazimah, "Pendekatan Sosio-Historis: *Ilmu Ushuluddin*", Vol. 11, No, 1 (2012), 60.

Pemimpin yang mampu melaksanakan keadilan meskipun non muslim lebih baik daripada pemimpin yang beragama Islam tetapi tidak mampu melaksanakan keadilan. Negara yang adil itu disokong oleh Allah SWT meskipun negara itu dipimpin oleh seorang yang bukan non muslim dan negara yang despotik tidak disokong Allah SWT meskipun pemimpinnya seorang muslim, syarat seorang pemimpin adalah adil tanpa memperhatikan agama yang dianutnya¹³

Apabila melihat penjelasan diatas, bisa dipahami bahwa Allah akan selalu mendukung seseorang yang adil meskipun ia bukan seorang muslim. Dalam ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an, keadilan merupakan salah satu ajaran penting sebagai pilar agar masyarakatnya dapat hidup damai, makmur, dan sejahtera serta memunculkan rasa persatuan tanpa adanya diskriminasi pada golongan tertentu.

Seorang pemimpin mengemban seluruh amanah dari anggota maupun individu yang ia pimpin. Ia harus melaksanakan kepemimpinan dengan adil, benar, serta berdiri di atas semua kalangan tanpa ada rasa pilih kasih. Adil merupakan salah satu unsur takwa, karena istilah takwa mengandung arti kesanggupan dalam memilah antara yang baik dan benar dengan penuh perhitungan serta pertimbangan.

Sebagai sosok yang mengedepankan kesetaraan derajat, Kiai Said mengatakan bahwa masing-masing warga negara harus memperoleh perlakuan dan hak yang sama. Sistem kasta atau pemihakan pada golongan tertentu tidak dibenarkan. Sistem pemerintahan yang dirasa paling sesuai

¹³ Siti Qoniah, Ashif Az Zafi, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim", 158.

dengan hal tersebut ialah sistem demokrasi, yang mana sistem pemerintahan bertumpu pada kedaulatan rakyat sebagai amanat dari Allah.¹⁴

Perilaku adil berkaitan dengan seluruh komponen kehidupan, mulai dari perkataan, hukum, persaksian, perlakuan, keyakinan, maupun amal. Seseorang yang punya kekuasaan atas hukum harus memutuskan permasalahan dengan adil tanpa berpihak pada satu sisi. Dalam suatu negara apabila warga negaranya memiliki keberagaman entah itu dari keyakinan, adat istiadat, aliran, dan strata sosial jika pemimpinnya tidak memiliki sikap adil maka sangat mudah terjadinya perseteruan serta perpecahan dalam negara tersebut. Akan muncul kesenjangan antar golongan yang akan memperkeruh keadaan suatu daerah jika permasalahan ini terjadi.

Keadilan bagian dari demokrasi, hal ini bisa ditegakkan jika tidak mengutamakan kepentingan pribadi maupun organisasi yang memunculkan perilaku dzolim seperti korupsi dan diskriminasi. Terdapat peluang untuk non muslim menjadi pemimpin selagi tidak membahayakan kebebasan dalam beragama.

Kemudian objek kedua yaitu Buya Yahya yang pemikirannya berpegang teguh pada sumber ajaran Islam. Disiarkan melalui kanal YouTube Al-Bahjah Tv, beliau menolak dengan tegas mengenai pemimpin non muslim karena bertentangan dengan ajaran sumber agama Islam. Apabila non muslim menjadi pemimpin dikhawatirkan akan memperbesar peluang penyebaran

¹⁴Budi Harianto, "Relasi Teologi Aswaja dengan HAM Perspektif Kiai Said Aqil Siroj", *Humanistika*, Vol. 4, No. 2 (2018), 34.

hal-hal yang berbau haram, dan kekafiran serta membahayakan umat Islam, karena segala sesuatu yang dilakukan pasti terdapat tujuan tersembunyi yang mempengaruhi ahlak dan keimanan seorang muslim.

Bisa dipahami penjelasan diatas, larangan umat muslim menjadikan non muslim karena pemimpin merupakan jabatan yang sangat strategis guna mencapai dan mengendalikan segala kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Muncul asumsi, jika non muslim yang akan menjadi pemimpin pasti ada maksud, tujuan, dan niat jahat pada umat Islam yang dapat melumpuhkan Islam dari dalam.

Memilih pemimpin bisa dianggap sebagai memberi loyalitas, jika non muslim diberi loyalitas dikhawatirkan mereka akan bertindak semaunya yang menyebabkan kita sebagai muslim menuruti segala perintah tanpa berpikir panjang dan mengacuhkan peraturan yang ada, terutama dalam hal keagamaan.

Wajar saja asumsi tersebut muncul, karena dari dahulu umat muslim sangat dibenci oleh non muslim dengan sifat serta cacian yang mereka miliki, dan pada sumber ajaran umat Islam yakni al-Qur'an melaknat mereka sebagai kaum yang menyebabkan kerusakan di dunia. Serta banyak ditemukan sejarah jika non muslim memperlambat perkembangan dakwah yang menimbulkan peperangan, tipu muslihat, dan pengkhianatan.

Kondisi ini semakin parah dengan adanya golongan kaum muslimin yang berkhianat dan diam-diam menjalin persengkongkolan, perjanjian

kerjasama dengan musuh guna melemahkan kekuatan umat muslim.¹⁵ Sehingga menurut penulis, pendapat yang dikemukakan Buya Yahya, tidak memunculkan harapan bagi seorang non muslim menjadi pemimpin pada pemerintahan yang mengatur perundang-undangan serta ketertiban, terutama pada negara yang masyarakatnya memeluk agama Islam.

Kemudian apabila non muslim diangkat sebagai pemimpin pada wilayah yang mayoritas warganya memeluk agama Islam, akan memudahkan penyebaran hal-hal yang berbau haram sehingga bisa mempengaruhi keyakinan dan ahlak dari umat muslim. Dapat kita lihat dinegara yang mayoritasnya non muslim, hal-hal yang dianggap haram oleh umat Islam sangat mudah ditemukan serta diperbolehkan seperti tempat untuk berjudi dan prostitusi.

Bisa diketahui dalam penulisan ini berusaha menunjukkan bahwa pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim dari sudut pandang Kiai Said Aqil Siradj dan Buya Yahya. Penulis berupaya menjelaskan motif-motif tersembunyi dari dua tokoh tersebut yang diharapkan bisa memberi solusi ditengah kebingungan masyarakat dalam memilih pemimpin yang rakyatnya banyak memeluk agama Islam untuk kedepannya.

Negara yang rakyatnya memiliki beberapa keyakinan pasti ada satu agama yang mendominasi. Disinilah muncul istilah “mayoritas” dan “minoritas”. Tugas dalam membuat dan mengatur kebijaksanaan pada suatu

¹⁵ Fatimah Askan, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir”, *Al-Fanar*, Vol. 2, No. 1 (2019), 32.

negara berada ditangan kaum mayoritas. Bagi kaum minoritas, mereka tidak dipercaya apalagi dianggap mampu menanggung tanggung jawab tersebut. Keadaan ini masih samar untuk dinyatakan atau bahkan diakui. Semestinya, undang-undang dasar yang dibuat oleh suatu daerah bisa melenyapkan seluruh diskriminasi diantara warganya, pada kenyataannya diskriminasi masih terjadi disetiap sudut daerah.¹⁶

Kaum minoritas punya hak-hak yang diperoleh dari negara atau daerah, sebab hak-hak ini terdapat pada syariah Islam, para mayoritas tidak bisa mengambil hak-hak yang dimiliki oleh minoritas. Akan tetapi, kaum mayoritas diperbolehkan memberikan hak-hak istimewa terhadap minoritas sesuai dengan perintah syariah dan tidak mengancam kebebasan suatu agama. Hak-hak tersebut diantaranya: perwakilan politik, kebebasan berpendapat, jabatan pemerintahan, pendidikan, perdagangan, serta profesi.¹⁷

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ Siti Qoniah, Ashif Az Zafi, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih dan Hukum Tata Negara di Indonesia", *Al-Imarah*, Vol. 5, No. 2 (2020), 155.

¹⁷ *Ibid.*, 155

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

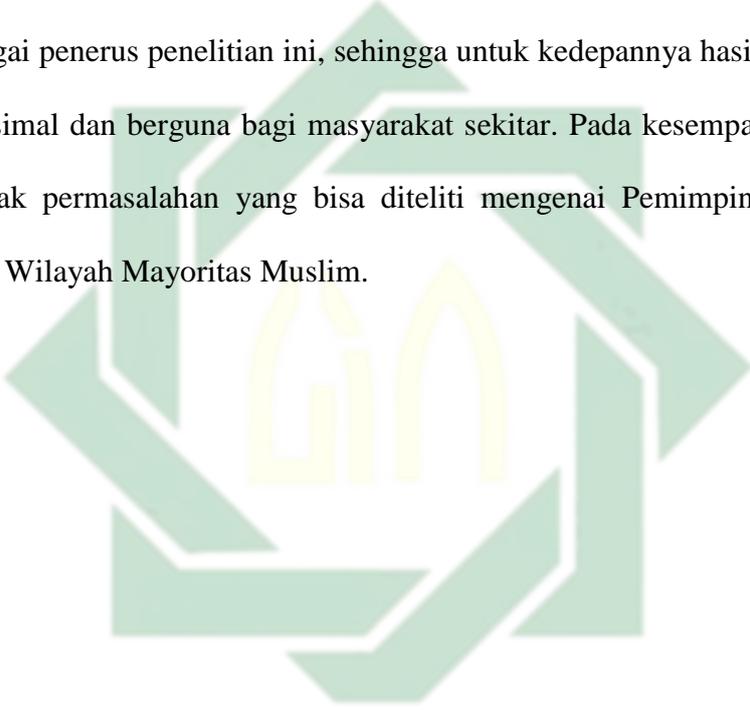
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim Menurut K.H. Said Aqil Siradj dan Buya Yahya Perspektif Hermeneutika Kritis Jurgen Habermas” penulis memperoleh hasil yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yakni:

1. Kiai Said Aqil Siradj memperbolehkan pemimpin non muslim pada wilayah mayoritas muslim, karena setiap warga negara mempunyai hak dan derajat yang sama untuk menjadi pemimpin. Sedangkan, Buya Yahya melarang memilih dan menjadikan non muslim sebagai pemimpin karena tidak sesuai dengan sumber hukum Islam yakni al-Qur’an.
2. Dari perspektif hermeneutika kritis Jurgen Habermas, K.H. Said Aqil Siradj memperbolehkan non muslim memimpin wilayah yang masyarakatnya muslim sebab beliau merupakan sosok dengan pemikiran yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini dan mengedepankan kesetaraan derajat. setiap manusia memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam hal apapun. Hal ini untuk menghindari perilaku diskriminasi terhadap golongan minoritas. Sedangkan Buya Yahya yang menolak pemimpin non muslim, karena beliau pemikirannya berpegang teguh pada sumber ajaran utama agama Islam.. Jika non muslim menjadi pemimpin, dikhawatirkan memperbesar peluang penyebaran hal-hal berbau haram, dan kekafiran yang dapat mempengaruhi keimanan. Serta,

non muslim tersebut memiliki maksud dan tujuan tersembunyi yang dapat menghancurkan umat Islam.

B. Saran

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunannya. Diharapkan ada penelitian selanjutnya sebagai penerus penelitian ini, sehingga untuk kedepannya hasilnya bisa lebih maksimal dan berguna bagi masyarakat sekitar. Pada kesempatan lain masih banyak permasalahan yang bisa diteliti mengenai Pemimpin Non Muslim Pada Wilayah Mayoritas Muslim.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal:

- Afifi, Nizar dan Ahmad Khoirun Minan. “Kepemimpinan Non Muslim Perpektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist”. *At-Turas*. Vol. 7. No. 1. 2020.
- Al-Munir, M. Ied. “Hermeneutika sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan”. *Titian*. Vol. 5. No. 1. 2021.
- Askan, Fatimah. “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir”. *Al-Fanar*. Vol. 2. No. 1. 2019.
- Atabik, Ahmad. Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas. *Fikrah* Vol. 1. No. 2. 2013.
- Az, Zafi, Ashif dan Siti Qoniah. “Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih dan Hukum Tata Negara di Indonesia”. *Al-Imarah*. Vol. 5. No. 2. 2020.
- Baharun, Hasan, Farah Nuril Badriyah,. “Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Islam Nusantara Perspektif KH. Said Aqil Siroj”. *Tafaqquh*. Vol. 8. No. 1 2020.
- Charis, Muhammad, dkk. “Kategori Kepemimpinan dalam Islam”. *Edukasi Nonformal*. Vol. 1. No.2. 2020.
- Djazimah, Nurul. “Pendekatan Sosio-Historis”. *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 11. No.1. 2012.
- Fauzia, Heni Hikmayani, dkk. “Kepemimpinan Situasional dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Komitmen Guru”. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 6. No. 2. 2018.
- Harianto, Budi. “Relasi Teologi Aswaja Dengan HAM Perspektif Kiai Said Aqil Siroj”. *Humanistika*. Vol. 4. No. 2. 2019.
- Harianto, Budi dan Nurul Syalafiyah. “Aswaja An-Nahdliyah Sebagai Representif Teologi Islam Nusantara Perspektif Kiai Said Aqil Siroj”. *Kontemplasi*. Vol. 7. No.2. 2019.
- Husnaeni. “Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Al-Dustur*. Vol.2. No.2. 2019.

- Ibrahim, Farid Wajdi. "Ilmu-Ilmu Ushuluddin Menjawab Problematika Umat Islam Dewasa Ini". *Ar-Raniry*. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Kerwanto. "Kepimpinan Non-Muslim: Konsep Wilayah dalam al-Qur'an sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim". *Kontemplasi*. Vol. 5. No. 2. 2017.
- Khalik, Abu Tholib. "Pemimpin Non Muslim dalam Perspektif Ibn Taimiyah". *Analisis*. Vol. 14, No. 1. 2014.
- Kurniawan, dkk. "Konsep Kepemimpinan Dalam Islam". *PRODU*. Vol. 2. No.1. 2020.
- Lufaei. "Reaktualisasi Dakwah Wali Songo: Gerak Dakwah KH. Said Aqil Siroj Dalam Menebar Islam Rahmatil lil alamin". *Aqlam*. Vol. 3. No.1. 2018.
- Madid, Izzul. "Dinamika Pemikiran Ulama dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia". *Mizani*. Vol. 5. No. 2. 2018.
- Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasae Konseptualnya. *Al-Afkar*". Vol. V. No.1. 2017.
- Martono. "Kajian Kritis Hermeneutika Friedrich Scheiermarcher VS Paul Ricoeur". *Edukasi Khatulistiwa*. Vol. 2. No. 1. 2019.
- Mattayang, Besse. "Tipe dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis". *Jemma*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Maufur, Syibli. "Analisis Tindak Tutur Buya Yahya dalam Interaksi Belajar Mengajar di Pesantren Al-Bahjah Cirebon". *Holistik*. Vol. 14. No. 2. 2013.
- Minan, Ahmad Khoiron dan Nizar Afifi. "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran dan Hadist". *At-Turas*. Vol. 7 No. 1. 2020.
- Nasir, Maliki Ahmad. "Hermeneutika Kritis (Studi Kritis atas Pemikiran Habernas)". *Islamia*. Vol. 1. No. 1. 2019.
- Olifiansyah, Muhammad, dkk. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam". *At-Tajdid*. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Rodin, Dede. "Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Al-Quran". *Mutawatir*. Vol. 7. No. 1. 2017.
- Saidi, Acep Iwan. "Hermeneutika, Sebuah Cara untuk Memahami Teks". *Jurnal Sosioteknologi*. Vol. 13 No. 7. 2008.

Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No.1. 2020.

Soemanagara, Syam. “Kepemimpinan Militer: Sejarah Singkat, Nilai, Prinsip, dan Ciri Khusus”. *Manajerial*. Vol. 2. No. 3. 2003.

Subhan, Moh. “Kepemimpinan Islami dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam”. *Tadris*. Vol. 8. No. 1. 2013.

Supardi, Asep Solikin dan H.M Fatchurrahman. “Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri”. *Anterior Jurnal*. Vol.16. No. 2. 2017.

Ulumuddin. “Jurgen Habermas dan Hermeneutika Kritis”. *Jurnal Hunafa*. Vol. 3 No. 1. 2006.

Widodo, Sembodo Ardi. “Metode Hermeneutik dalam Pendidikn”. *Unisia*. Vol. XXXI. No. 70. 2008.

Sumber dari Internet:

TVNU Televisi Nahdlatul Ulama. 3 Mei, 2016. “KH Said Aqil Sirodj: Pemimpin Muslim atau Non Muslim”. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=y6FsFZw7gqc&t=20s>

Al-Bahjah Tv. 15 Maret, 2016. “Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim – Buya Yahya Menjawab”. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4esUrcmDnuI>

Al-Bahjah Tv. 5 April, 2017. “Masihkah Anda Memilih Pemimpin Non Muslim?”. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=ORvGnLIZtJs&t=286s>

Sumber dari Buku:

Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleimacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.